



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH  
UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan adanya pergantian Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Menjadi Organisasi Perangkat Daerah, Penghapusan beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah dan Pengangkatan Kembali (Penguahan)/Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018, perlu Menunjukkan/Menetapkan Bendahara Umum Daerah Untuk Mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Umum Daerah Untuk Mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2017;
16. Keputusan Walikota Ambon Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Esalon II, III dan IV di Lingkungan pemerintah Kota Ambon;
17. Keputusan Walikota Ambon Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Esalon II, III dan IV di Lingkungan pemerintah Kota Ambon;
18. Keputusan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kembali (Penguahan) Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
19. Keputusan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kembali (Penguahan) / Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
20. Keputusan Walikota Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kembali (Penguahan)/ Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
21. Keputusan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengangkat Kembali (Penguahan)/ Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon JACKY TALAHATU, SE. M.Si NIP: 19690929 1999803 1 011 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berwenang:
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  9. Menyiapkan informasi keuangan daerah;
  10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  11. Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2016;
  12. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  13. Menandatangani Daftar Uji SP2D atas beban rekening kas daerah.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam Menatausahaan Kas dan Kekayaan Daerah lainnya Bertanggungjawab Kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan, pejabat dimaksud dalam diktum kesatu dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- KELIMA : Contoh tanda-tangan serta paraf dari pejabat yang ditetapkan dalam diktum kesatu sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tak terpisah dari keputusan ini.
- KEENAM : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Umum Daerah Untuk Mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 di nyatakan Tidak Berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 2 Januari 2018

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada:



1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Ambon, BRI, BNI, Danamon Cabang Ambon;
3. Inspektur/ Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Lurah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
4. Kepala SMP Negeri se Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor : 5 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penunjukan / Penetapan Bendahara Umum Daerah Untuk Mengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Selaku	Tanda Tangan	Paraf
1.	JACKY TALAHAHTU, SE. M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19690929 199803 1 011	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Bendahara Umum Daerah		

  
WALIKOTA AMBON,  
RICHARD SOUHENA PESSY